
Implementasi Citizenship Education di Perguruan Tinggi

Basariah*, Dahlan, Mohammad Ismail

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, FKIP Universitas Mataram, Jl. Majapahit No. 62, Mataram NTB, 83125. Indonesia

*Corresponding Author: basyariah@unram.ac.id

Article History

Received : January 06th, 2024

Revised : February 07th, 2024

Accepted : February 15th, 2024

Abstract: Citizenship education merupakan istilah dari pendidikan kewarganegaraan. Salah satu tujuan dari pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan adalah untuk membentuk warga negara yang baik di Perguruan Tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di FKIP Universitas Mataram dan dampaknya terhadap pengembangan karakter dan kesadaran sosial mahasiswa. Berdasarkan kebijakan nasional yang menekankan pentingnya PKn sebagai bagian integral dari kurikulum perguruan tinggi, penelitian ini mengkaji bagaimana pendekatan berbasis proyek (*Project-Based Learning* atau PjBL) diterapkan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap isu-isu kewarganegaraan. Metode PjBL dipilih karena kemampuannya untuk mengaktifkan mahasiswa dalam proses pembelajaran yang kontekstual dan relevan dengan kondisi sosial yang ada. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan dosen, survei kepada mahasiswa, dan analisis dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis proyek tidak hanya meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam pembelajaran PKn tetapi juga mendorong pengembangan keterampilan kritis, kolaborasi, dan literasi digital yang relevan dengan tuntutan globalisasi. Produk-produk yang dihasilkan mahasiswa, seperti video edukasi dan kampanye digital, juga berkontribusi pada peningkatan kesadaran masyarakat terhadap isu-isu kewarganegaraan. Evaluasi komprehensif yang melibatkan proses, produk, dan refleksi juga terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan gambaran tentang bagaimana kebijakan Pendidikan Kewarganegaraan yang adaptif dan berbasis proyek dapat memperkuat peran mahasiswa sebagai warga negara yang aktif dan bertanggung jawab.

Keywords: Citizenship education, perguruan tinggi, Project-Based Learning

PENDAHULUAN

Pendidikan kewarganegaraan merupakan instrumen strategis dalam membangun generasi yang memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, sekaligus berperan aktif dalam kehidupan demokrasi. Di era globalisasi ini, tantangan terhadap identitas nasional dan integrasi sosial semakin kompleks, yang diperparah oleh pengaruh negatif perkembangan teknologi dan arus informasi yang tidak terbandung. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi tidak hanya menjadi sarana pembelajaran normatif, tetapi juga alat untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan, keterampilan kewarganegaraan, dan komitmen terhadap demokrasi.

Pendidikan kewarganegaraan merupakan upaya sistematis untuk membangun kecakapan individu dalam memahami dan melaksanakan

perannya sebagai warga negara dalam masyarakat demokratis. Banks (2017) mendefinisikan pendidikan kewarganegaraan sebagai proses untuk membantu individu mengembangkan keterampilan berpikir kritis, nilai-nilai demokrasi, dan kemampuan untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat. Di Indonesia, pendidikan kewarganegaraan dirancang untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan wawasan kebangsaan sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua. Semua hal tersebut diproses untuk melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan

hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (Soemantri, 2001). Dalam Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 37 Ayat (1) huruf dinyatakan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan kewarganegaraan. Demikian juga pada ayat (2) huruf b dinyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan kewarganegaraan.

Di perguruan tinggi, pendidikan kewarganegaraan memiliki peran penting dalam membangun kesadaran mahasiswa terhadap isu-isu lokal, nasional, dan global. Menurut Nurdin (2021), pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi harus berorientasi pada pengembangan literasi kewarganegaraan (*civic literacy*), termasuk pemahaman terhadap hak dan kewajiban warga negara, keterampilan berkomunikasi dalam konteks demokrasi, dan keterlibatan dalam isu-isu sosial.

Literasi kewarganegaraan (*civic literacy*) merujuk pada kemampuan individu untuk memahami dan mengaplikasikan konsep-konsep kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini meliputi pemahaman terhadap hukum dan konstitusi, keterampilan partisipasi politik, serta kesadaran akan tanggung jawab sosial (Dewi, 2022). Literasi kewarganegaraan menjadi salah satu target utama pendidikan kewarganegaraan karena mencakup elemen kognitif, afektif, dan psikomotorik.

Penelitian oleh Torney-Purta et al. (2017) menunjukkan bahwa mahasiswa yang memiliki literasi kewarganegaraan yang tinggi cenderung lebih aktif dalam kegiatan sosial-politik, memiliki toleransi terhadap perbedaan, dan mampu berpikir kritis terhadap isu-isu yang memengaruhi kehidupan masyarakat. Di Indonesia, literasi kewarganegaraan masih menjadi tantangan karena rendahnya minat mahasiswa dalam memahami isu-isu kebangsaan secara mendalam (Suryadi, 2021). Hal tersebut tentunya dapat dilatih dan dibiasakan melalui proses pembelajaran baik di kelas maupun di luar kelas.

Berbagai pendekatan pembelajaran telah diterapkan untuk meningkatkan efektivitas pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Pendekatan berbasis proyek (*project-based learning*) merupakan salah satu yang paling efektif dalam membangun keterampilan analitis dan partisipatif mahasiswa. Dalam model ini, mahasiswa diajak untuk mengidentifikasi isu-

isu sosial, menganalisis kebijakan, dan merancang solusi yang relevan (Rohim, 2022).

Selain itu, integrasi teknologi dalam pembelajaran kewarganegaraan semakin penting di era digital. Menurut Surya dan Santoso (2023), penggunaan teknologi informasi dapat meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam diskusi publik, memperkuat pemahaman mereka terhadap isu-isu global, dan mendorong partisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat.

Sebagai salah satu mata kuliah wajib di perguruan tinggi, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran penting dalam mengembangkan *civic literacy*, *civic responsibility*, dan *civic engagement* pada mahasiswa. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menegaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan harus menanamkan wawasan kebangsaan, kesadaran konstitusional, serta kemampuan kritis dalam menghadapi isu-isu kewarganegaraan. Hal ini sejalan dengan pandangan Banks (2017), yang menyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan di abad ke-21 harus mampu menjawab kebutuhan global dengan mempromosikan nilai-nilai inklusivitas, toleransi, dan partisipasi aktif dalam demokrasi.

Sebagai institusi pendidikan yang berfokus pada pengembangan calon pendidik, FKIP Universitas Mataram memiliki tanggung jawab besar dalam menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan yang relevan dan efektif. Berdasarkan penelitian oleh Lestari et al. (2022), program pendidikan kewarganegaraan di FKIP Universitas Mataram telah mengadopsi pendekatan interaktif, seperti diskusi kelompok, simulasi, dan studi kasus. Namun, penelitian ini juga mencatat beberapa kendala, seperti kurangnya inovasi dalam desain pembelajaran dan keterbatasan fasilitas pendukung.

Di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Mataram, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya difokuskan pada penguasaan teori, tetapi juga pada praktik nyata untuk membentuk mahasiswa sebagai warga negara yang aktif dan bertanggung jawab. Pembelajaran berbasis proyek, diskusi interaktif, dan studi kasus menjadi pendekatan yang sering digunakan untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap isu-isu lokal dan global. Meski demikian, efektivitas pelaksanaan Pendidikan Kewarganegaraan masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti kurangnya inovasi dalam metode pembelajaran, keterbatasan sarana dan

prasarana, serta rendahnya minat mahasiswa dalam mendalami materi kewarganegaraan (Suryadi, 2021).

Lebih jauh lagi, pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi perlu disesuaikan dengan konteks perkembangan masyarakat digital saat ini. Literasi digital menjadi salah satu keterampilan mendasar yang harus dimiliki mahasiswa agar mampu menyaring informasi yang beredar, terlibat dalam diskusi publik secara bijak, dan memahami isu-isu kebangsaan melalui perspektif yang kritis. Hal ini didukung oleh riset terbaru yang menunjukkan bahwa integrasi teknologi dalam pembelajaran kewarganegaraan dapat meningkatkan partisipasi aktif mahasiswa dalam isu-isu sosial-politik (Rohim, 2022).

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan di FKIP Universitas Mataram, dengan fokus pada metode pembelajaran, relevansi materi dengan kebutuhan mahasiswa, serta tantangan yang dihadapi dalam membangun kesadaran kewarganegaraan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan model pendidikan kewarganegaraan yang lebih inovatif, kontekstual, dan efektif di perguruan tinggi.

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk menggali pemahaman yang mendalam mengenai implementasi pendidikan kewarganegaraan di lingkungan perguruan tinggi. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan eksplorasi fenomena sosial yang kompleks dalam konteks pendidikan. Penelitian ini menggunakan desain studi kasus (*case study*). Studi kasus dipilih karena cocok untuk memahami secara mendalam proses, dinamika, dan konteks pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan di FKIP Universitas Mataram. Menurut Yin (2018), pendekatan studi kasus memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena dalam kondisi kehidupan nyata, terutama ketika batasan antara fenomena dan konteksnya tidak jelas. Penelitian ini dilaksanakan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Mataram. FKIP dipilih karena memiliki peran strategis dalam membangun kompetensi calon pendidik, termasuk dalam pendidikan kewarganegaraan.

Teknik pemilihan subyek penelitian dilakukan dengan metode *purposive sampling* untuk memastikan data yang diperoleh relevan dan mendalam. Kriteria partisipan meliputi pengalaman mengajar atau belajar Pendidikan Kewarganegaraan serta pemahaman terhadap implementasi kurikulum. Subyek dalam penelitian ini adalah 1) Dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di FKIP Universitas Mataram. 2) Mahasiswa yang telah mengikuti mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. 3) Pimpinan fakultas yang terkait dengan kebijakan akademik.

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan dosen, mahasiswa, dan pimpinan fakultas. Hal ini bertujuan untuk memperoleh data yang detail terkait proses pembelajaran, kendala, dan efektivitas pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan. Wawancara direkam dengan izin partisipan untuk menjaga keakuratan data (Creswell, 2018). Observasi dilakukan terhadap aktivitas pembelajaran di kelas, termasuk metode pengajaran, interaksi antara dosen dan mahasiswa, serta penggunaan media pembelajaran. Observasi ini bertujuan untuk memahami dinamika proses pembelajaran kewarganegaraan secara langsung. Teknik observasi yang digunakan adalah observasi partisipatif pasif, di mana peneliti tidak terlibat langsung dalam aktivitas pembelajaran (Merriam, 2019). Dokumen yang dianalisis meliputi silabus, Rencana Pembelajaran Semester (RPS), dan kebijakan terkait pendidikan kewarganegaraan di FKIP Universitas Mataram. Analisis dokumen digunakan untuk melengkapi data dari wawancara dan observasi serta untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan pendidikan diterapkan.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan model interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang meliputi tiga tahapan utama, yakni 1) Reduksi Data: Merangkum dan memfokuskan data yang relevan dengan penelitian. 2) Penyajian Data: Menyusun data dalam bentuk narasi, tabel, atau diagram untuk memudahkan analisis. 3) Penarikan Kesimpulan: Mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan antar data untuk menghasilkan temuan yang valid. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber dan metode, diskusi dengan ahli, dan pengecekan kembali data kepada partisipan (*member checking*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pendidikan Kewarganegaraan (Citizenship Education) merupakan salah satu Mata Kuliah Wajib

Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi telah memiliki dasar hukum yang kuat, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Keputusan Dirjen Dikti Nomor 84/E/KPT/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi. Aturan ini memperkuat posisi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai mata kuliah yang fundamental dalam membentuk karakter mahasiswa.

Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi diarahkan untuk memperkuat pemahaman mahasiswa mengenai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Tujuan utamanya adalah membentuk generasi muda yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Substansi yang diajarkan meliputi pengantar pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional, integrasi nasional, konstitusi di Indonesia, hak dan kewajiban warga negara, dinamika demokrasi, penegakan hukum, wawasan nusantara, dan ketahanan nasional. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud Nomor 84/E/KPT/2020, mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS dan diatur sebagai mata kuliah wajib di perguruan tinggi.

2. Implementasi Pendidikan Kewarganegaraan (Citizenship Education) di FKIP Universitas Mataram

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di FKIP Universitas Mataram dilaksanakan berdasarkan kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Keputusan Dirjen Dikti Nomor 84/E/KPT/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib. Berdasarkan kebijakan ini, PKn menjadi mata kuliah wajib yang bertujuan membentuk mahasiswa sebagai warga negara yang berkarakter, memahami hak dan kewajiban, serta memiliki rasa cinta tanah air. FKIP Universitas Mataram mengadaptasi kebijakan ini ke dalam kurikulum dengan menekankan pada pendekatan pembelajaran inovatif yang relevan dengan era digital dan globalisasi. Salah satu pendekatan yang

diintegrasikan adalah pembelajaran berbasis proyek (Project-Based Learning atau PjBL).

Pembelajaran PKn di FKIP Universitas Mataram dirancang menggunakan pendekatan berbasis proyek untuk meningkatkan keterlibatan mahasiswa secara aktif. Proyek yang diberikan kepada mahasiswa melibatkan tema-tema seperti toleransi, hak asasi manusia, partisipasi politik, dan penguatan nilai-nilai kebangsaan. Proses pembelajaran dimulai dengan tahap identifikasi masalah di masyarakat yang relevan dengan topik kewarganegaraan. Mahasiswa kemudian diminta untuk merancang solusi berbasis proyek yang aplikatif, seperti kampanye kesadaran, penelitian sederhana, atau pembuatan media edukasi.

Pelaksanaan proyek dilakukan secara kelompok dengan bimbingan dosen. Dosen berperan sebagai fasilitator yang membantu mahasiswa mengidentifikasi sumber daya, mengarahkan proses penelitian, dan memonitor implementasi proyek di lapangan. Mahasiswa juga memanfaatkan teknologi digital dalam pelaksanaan proyek, seperti membuat video edukasi, mengembangkan platform digital untuk diskusi kewarganegaraan, atau menyelenggarakan webinar terkait isu-isu kewarganegaraan.

Produk dari pembelajaran berbasis proyek ini mencerminkan kreativitas dan inovasi mahasiswa. Beberapa produk yang dihasilkan antara lain:

- a. Video edukasi yang membahas pentingnya toleransi di era digital.
- b. Media edukasi pendidikan kewarganegaraan.
- c. Kampanye digital melalui media sosial yang mengangkat isu-isu partisipasi pemuda dalam demokrasi.
- d. Penelitian sederhana tentang keragaman masyarakat lokal dikaji dari sisi kewarganegaraan.

Produk-produk tersebut tidak hanya meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang materi PKn, tetapi juga berkontribusi pada masyarakat melalui hasil yang dapat diakses publik. Evaluasi dalam pembelajaran berbasis proyek dilakukan secara menyeluruh. Dosen mengevaluasi tiga aspek utama, yaitu:

- a. Proses pelaksanaan proyek. Kegiatan ini dinilai melalui logbook dan laporan kemajuan yang dibuat mahasiswa selama proyek berlangsung.
- b. Kualitas produk akhir. Dosen mengevaluasi hasil proyek berdasarkan

inovasi, relevansi, dan dampaknya terhadap masyarakat.

- c. Presentasi dan refleksi. Mahasiswa mempresentasikan hasil proyeknya di hadapan dosen dan rekan-rekan sekelas, diikuti dengan diskusi dan refleksi untuk mendalami pengalaman belajar.
- d. Evaluasi juga melibatkan rubrik penilaian yang mengukur keterlibatan aktif mahasiswa, kemampuan kolaborasi, dan penerapan konsep PKn dalam proyek mereka.

Dari proses kegiatan pembelajaran berbasis proyek, mahasiswa memiliki banyak pengalaman. Beberapa pengalaman mahasiswa selama mengikuti pembelajaran berbasis proyek antara lain, 1) Peningkatan keterampilan berpikir kritis. Melalui pembelajaran berbasis proyek, mahasiswa lebih mampu menganalisis masalah kewarganegaraan secara mendalam dan mengembangkan solusi yang aplikatif. 2) Penguatan keterampilan kolaborasi. Melalui kerja kelompok dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek itu, mahasiswa belajar berkomunikasi, bernegosiasi, dan bekerja sama dengan rekan tim. 3) Pemahaman yang lebih baik tentang konsep kewarganegaraan. Keterlibatan langsung mahasiswa dalam proyek membuat mahasiswa lebih memahami nilai-nilai kewarganegaraan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. 4) Peningkatan literasi digital. Penggunaan teknologi dalam proyek membantu mahasiswa mengasah keterampilan literasi digital mereka. 5) Pengalaman sosial yang bermakna. Mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk berinteraksi dengan masyarakat, sehingga mereka lebih memahami kebutuhan dan tantangan yang ada di lapangan.

Pembahasan

Kebijakan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di FKIP Universitas Mataram telah dirancang selaras dengan regulasi nasional, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Keputusan Dirjen Dikti Nomor 84/E/KPT/2020. Kebijakan ini menggarisbawahi pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan sebagai bagian integral dari kurikulum wajib di perguruan tinggi, dengan tujuan utama membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang berkarakter, memiliki kesadaran akan hak dan kewajibannya, serta mencintai tanah air. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan upaya strategis

untuk mempersiapkan generasi muda menjadi warga negara yang kritis dan sadar akan hak serta kewajibannya, baik dalam konteks bermasyarakat maupun bernegara. Pendidikan ini juga bertujuan membentuk individu yang siap menjadi bagian dari masyarakat global yang cerdas dan bertanggung jawab. Melalui Pendidikan Kewarganegaraan, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjalankan perannya sebagai Warga Negara Indonesia yang paham akan hak dan kewajibannya, berpikir kritis, bersikap toleran, cinta damai, serta mampu berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik baik lokal, nasional, maupun internasional. Sesuai dengan tujuan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), mahasiswa diarahkan untuk menjadi individu yang berintegritas, bangga terhadap Indonesia, cinta tanah air, jujur, disiplin, bertanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berbagai interaksi di lingkungan rumah, sekolah, masyarakat, maupun dalam konteks berbangsa dan bernegara (Supriyanto, 2018). Muatan materi yang ada dalam buku ajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (2016) menunjukkan substansi yang sejalan dengan pedoman kurikulum, meskipun terdapat perbedaan detail dalam penerapan materi antara buku ajar tersebut dan Keputusan Dirjen Dikti. Perbedaan ini mencerminkan dinamika pengembangan kebijakan dan penyempurnaan materi ajar yang berorientasi pada kebutuhan aktual mahasiswa di era globalisasi.

Di FKIP Universitas Mataram, kebijakan tersebut diadaptasi dengan penekanan pada pendekatan pembelajaran yang inovatif dan kontekstual. Pendekatan berbasis proyek (*Project-Based Learning* atau PjBL) dipilih karena kemampuannya untuk mendorong mahasiswa agar lebih aktif, kreatif, dan kritis dalam memahami isu-isu kewarganegaraan. Hal ini juga sesuai dengan perkembangan kebutuhan pendidikan di era globalisasi dan digitalisasi, di mana mahasiswa perlu memiliki kompetensi literasi digital dan berpikir kritis (Hadiyanto, 2021). Lebih jauh lagi, kebijakan ini didukung oleh upaya institusi untuk mengintegrasikan nilai-nilai lokal dan nasionalisme dalam pembelajaran, sejalan dengan kajian yang menyatakan bahwa pembelajaran PKn yang kontekstual dapat meningkatkan identitas

nasional dan partisipasi aktif mahasiswa dalam masyarakat (Winarno, 2020).

Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya mengajarkan kepatuhan terhadap negara, tetapi juga membentuk karakter warga negara yang toleran dan mandiri. David Kerr (1999) menjelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan proses yang mencakup persiapan generasi muda untuk mengambil peran dan tanggung jawab sebagai warga negara, yang melibatkan pendidikan formal melalui sekolah dan proses pembelajaran lainnya. Pendidikan ini bertujuan membangun pengetahuan, keterampilan, dan karakter warga negara yang mendukung keberlangsungan sistem demokrasi dan kesejahteraan bersama (Quigley, Buchanan, & Bachmuller, 1991). Dengan demikian, mahasiswa dapat memahami perannya secara lebih mendalam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan dirancang pula pembelajaran yang relevan dengan kemajuan zaman sehingga dapat membentuk warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek di FKIP Universitas Mataram dirancang secara sistematis untuk mengintegrasikan teori dan praktik. Pendekatan ini memberikan peluang bagi mahasiswa untuk memahami isu-isu kewarganegaraan melalui pengalaman langsung. Proyek yang dirancang melibatkan tema-tema relevan seperti toleransi, hak asasi manusia, dan partisipasi politik, yang bertujuan membangun kesadaran kritis mahasiswa terhadap peran mereka sebagai warga negara.

Metode ini sejalan dengan penelitian Suparno dan Yulianti (2022) yang menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis proyek dapat meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam proses belajar serta memberikan pengalaman yang mendalam mengenai konteks nyata dari isu-isu kewarganegaraan. Penggunaan teknologi digital dalam pelaksanaan proyek, seperti pembuatan video edukasi atau platform digital, menambah dimensi pembelajaran dengan mengintegrasikan literasi digital, yang merupakan salah satu keterampilan abad ke-21 (Trilling & Fadel, 2021).

Dalam pelaksanaan pembelajaran dosen sebagai pengajar dan pengarah bagi mahasiswa memiliki peran yang sangat vital. Bimbingan dosen sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran berbasis proyek menjadi

komponen penting. Peran ini menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, di mana mahasiswa dapat mengembangkan ide-ide kreatifnya dan mengatasi tantangan selama pelaksanaan proyek. Hal ini didukung oleh temuan Mardiana (2023), yang menyatakan bahwa bimbingan dosen secara efektif meningkatkan kualitas hasil pembelajaran mahasiswa dalam pendekatan berbasis proyek. Dari kegiatan proyek yang dilakukan, mahasiswa dituntut untuk menghasilkan produk relevan untuk dapat dimanfaatkan oleh orang lain.

Produk-produk yang dihasilkan dari pembelajaran berbasis proyek mencerminkan kreativitas dan relevansi mahasiswa terhadap isu-isu kewarganegaraan. Video edukasi, media edukasi, dan kampanye digital yang dihasilkan menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya memahami konsep-konsep kewarganegaraan secara teoretis tetapi juga mampu mengaplikasikannya untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurut Santoso (2021), produk yang relevan dan aplikatif dari pembelajaran berbasis proyek dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap materi yang diajarkan, sekaligus berkontribusi pada peningkatan kesadaran masyarakat tentang isu-isu kewarganegaraan. Produk-produk ini juga menjadi indikator keberhasilan dalam mengintegrasikan konsep kewarganegaraan dengan keterampilan praktis mahasiswa.

Sebagaimana pembelajaran seperti biasanya, evaluasi juga tetap dilaksanakan. Evaluasi yang dilakukan oleh dosen dalam pembelajaran berbasis proyek mencakup proses, produk, dan refleksi. Evaluasi proses melalui logbook dan laporan kemajuan memungkinkan dosen untuk memantau keterlibatan mahasiswa secara mendalam. Evaluasi produk memberikan apresiasi terhadap hasil kerja mahasiswa, sementara refleksi memberikan ruang untuk memperbaiki dan mendalami pembelajaran yang telah dilakukan.

Pendekatan evaluasi ini sejalan dengan kajian yang dilakukan oleh Permana dan Sari (2022), yang menekankan pentingnya evaluasi komprehensif dalam pembelajaran berbasis proyek untuk memastikan bahwa semua aspek pembelajaran tercakup, dari proses hingga hasil akhirnya. Evaluasi ini juga membantu mahasiswa untuk mengenali kekuatan dan kelemahan mereka selama proses pembelajaran, sehingga mereka dapat meningkatkan diri secara berkelanjutan. Melalui pengayaan materi dan

dukungan kebijakan yang komprehensif, Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan dalam membentuk generasi muda yang berkarakter dan siap menghadapi tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara di masa depan.

Mahasiswa mendapatkan banyak pengalaman berkesan dalam pelaksanaan proyek dari mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Pengalaman berupa pengalaman langsung dan tidak langsung. Pengalaman langsung mahasiswa dalam pembelajaran berbasis proyek menunjukkan dampak yang signifikan terhadap perkembangan mereka, baik secara akademis maupun sosial. Mahasiswa menyatakan terdapat peningkatan keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, dan literasi digital, yang semuanya relevan untuk menghadapi tantangan di era globalisasi.

Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Putri et al. (2021) yang menunjukkan bahwa keterlibatan langsung mahasiswa dalam proyek berbasis kewarganegaraan dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang nilai-nilai demokrasi, toleransi, dan keadilan sosial. Selain itu, pengalaman interaksi dengan masyarakat selama pelaksanaan proyek memberikan wawasan mendalam tentang realitas sosial, yang tidak dapat sepenuhnya diajarkan melalui pembelajaran konvensional.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis proyek dalam Pendidikan Kewarganegaraan di FKIP Universitas Mataram memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman dan keterampilan mahasiswa. Kebijakan yang mendukung, pelaksanaan yang sistematis, dan evaluasi yang komprehensif semuanya mendukung keberhasilan pembelajaran ini. Pendekatan ini tidak hanya relevan dengan konteks lokal tetapi juga memberikan fondasi yang kuat bagi mahasiswa untuk berperan aktif dalam masyarakat global.

Kebijakan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di FKIP Universitas Mataram dirancang untuk mengintegrasikan regulasi nasional dengan kebutuhan pendidikan abad ke-21. Mata kuliah PKn diwajibkan untuk membentuk karakter mahasiswa yang berlandaskan nilai-nilai kewarganegaraan, kesadaran hak dan kewajiban, serta kecintaan pada tanah air. Implementasi kebijakan ini difokuskan pada metode

pembelajaran inovatif seperti Project-Based Learning (PjBL), yang bertujuan meningkatkan keterlibatan aktif mahasiswa serta membekali mereka dengan keterampilan berpikir kritis dan literasi digital.

Pelaksanaan PjBL di FKIP Universitas Mataram memadukan teori dan praktik melalui proyek bertema kewarganegaraan, seperti toleransi, hak asasi manusia, dan partisipasi politik. Proses ini dirancang secara sistematis dengan dukungan teknologi digital, yang menambah dimensi pembelajaran kontemporer. Peran dosen sebagai fasilitator memungkinkan mahasiswa mengembangkan ide-ide kreatif dan menyelesaikan tantangan selama proyek berlangsung, menjadikan pembelajaran lebih bermakna dan relevan. Produk-produk berbasis proyek seperti video edukasi, kampanye digital, dan media edukasi pembelajaran PKn menunjukkan kemampuan mahasiswa mengaplikasikan konsep kewarganegaraan dalam karya yang bermanfaat bagi masyarakat. Hasil-hasil ini tidak hanya memperdalam pemahaman teoretis mahasiswa tetapi juga meningkatkan kesadaran publik tentang isu-isu penting kewarganegaraan, sehingga menunjukkan keberhasilan pembelajaran berbasis proyek dalam menghasilkan output yang relevan dan aplikatif.

Evaluasi komprehensif meliputi proses pelaksanaan proyek, kualitas produk akhir, dan refleksi. Hal ini memastikan bahwa setiap aspek pembelajaran, mulai dari keterlibatan mahasiswa hingga hasil kerja mereka, mendapat perhatian yang memadai. Pendekatan ini mendorong mahasiswa untuk mengenali kekuatan dan kelemahan mereka, sekaligus memotivasi mereka untuk terus berkembang. Pengalaman langsung mahasiswa dalam PjBL memberikan dampak signifikan terhadap keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, literasi digital, serta pemahaman nilai-nilai kewarganegaraan. Interaksi dengan masyarakat selama pelaksanaan proyek juga memberikan wawasan yang mendalam tentang realitas sosial, sehingga mahasiswa tidak hanya belajar dari teori tetapi juga memperoleh pengalaman kontekstual yang relevan untuk kehidupan mereka sebagai warga negara.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan untuk semua pihak yang terlibat dalam penelitian ini

baik bapak ibu dosen yang mampu matakuliah pendidikan kewarganegaraan di FKIP Universitas Mataram, Mahasiswa yang telah dan sedang mengikuti matakuliah pendidikan kewarganegaraan, dan pemangku kebijakan di FKIP Universitas Mataram.

REFERENSI

- Banks, J. A. (2017). *Civic Education in a Global Context: Challenges and Opportunities*. Teachers College Press.
- Creswell, J. W. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Sage Publications.
- Dewi, R. (2022). Penguatan Literasi Kewarganegaraan di Era Digital. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 19(2), 85-97.
- Hadiyanto, R. (2021). Literasi Digital dan Berpikir Kritis dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Pendidikan*, 20(2), 45-58.
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 84/E/KPT/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pembelajaran di Perguruan Tinggi. (2020). Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Lestari, A., et al. (2022). Analisis Implementasi Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. *Civics Journal*, 24(1), 12-25.
- Mardiana, D. (2023). *Peran Bimbingan Dosen dalam Pembelajaran Berbasis Proyek di Pendidikan Tinggi*. *Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, 18(1), 34-47.
- Merriam, S. B. (2019). *Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation*. Jossey-Bass.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Sage Publications.
- Permana, P., & Sari, L. (2022). Evaluasi Komprehensif dalam Pembelajaran Berbasis Proyek untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran. *Jurnal Pendidikan dan Evaluasi*, 12(3), 201-215.
- Putri, R., Setyawan, A., & Wijaya, T. (2021). Pengaruh Pembelajaran Berbasis Proyek terhadap Keterampilan Sosial Mahasiswa dalam Isu Kewarganegaraan. *Jurnal Pendidikan Sosial*, 14(1), 72-85.
- Rohim, M. (2022). Integrasi Teknologi dalam Pembelajaran Kewarganegaraan: Studi Kasus di Perguruan Tinggi. *Jurnal Kewarganegaraan*, 21(4), 45-58.
- Santoso, A. (2021). Produk Pembelajaran Berbasis Proyek dan Peningkatan Kesadaran Masyarakat tentang Isu Kewarganegaraan. *Jurnal Kajian Kewarganegaraan*, 19(2), 56-70.
- Suparno, I., & Yulianti, Y. (2022). *Pengaruh Pembelajaran Berbasis Proyek terhadap Keterlibatan Mahasiswa dalam Proses Belajar*. *Jurnal Pendidikan Berbasis Proyek*, 10(4), 115-130.
- Surya, T., & Santoso, R. (2023). Pembelajaran Digital dan Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan di Era Global. *Jurnal Inovasi Pendidikan*, 30(1), 33-49.
- Suryadi, A. (2021). Tantangan dan Peluang Pendidikan Kewarganegaraan di Era Digital. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 19(2), 101-115.
- Trilling, B., & Fadel, C. (2021). *21st Century Skills: Learning for Life in Our Times*. Jossey-Bass.
- Torney-Purta, J., et al. (2017). Civic Knowledge, Attitudes, and Engagement: The Role of Civic Education. *International Journal of Civic Education*, 15(3), 33-47.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. (2012). Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Winarno, W. (2020). *Pembelajaran Kontekstual untuk Meningkatkan Identitas Nasional dan Partisipasi Mahasiswa*. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 22(3), 91-104.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. Sage Publications.